

EDISI : Selasa, 12 Februari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Media: **WARTA BACI**

Kategori: **PELAYAN**



BAHAS RANPERDA: Ketua Pansus I DPRD Buleleng, Nyoman Wandira Adi geber pembahasan Renperda Retribusi Kesehatan.

Bahas Ranperda Retribusi Kesehatan

Pansus II DPRD Buleleng Libatkan Puskesmas

BULELENG - Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Buleleng No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, terus digenjot Pansus II DPRD Buleleng. Tidak hanya dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah, untuk mematangkan pembahasan ranperda yang sangat berkaitan dengan PAD dan kemampuan ekonomi masyarakat ini, Pansus II juga minta saran masukan dari stakeholder terkait.

"Kita akan undang dokter dan paramedis dari Puskesmas, masing-masing 3 Puskesmas dari wilayah Timur, Tengah dan Barat, serta 2 RS Pratama," tandas Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, Senin (11/2) saat memimpin

rapat Pansus II di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng.

Saran dan masukan dari Puskesmas dan RS Pratama, kata vokalis dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, dibutuhkan untuk mendapat kejelasan tentang retribusi pelayanan kesehatan. "Sehingga kita mendapat informasi dan data riil dilapangan, karena Perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan ini dibuat untuk mensejahterakan masyarakat, bukan justru membuat warga masyarakat susah," tegasnya.

Ditambahkan, saran masukan dari stakeholder terkait ini juga dibutuhkan untuk mengetahui pendapat publik apakah kenaikan tarif atau retribusi pelayanan kesehatan mendesak dilakukan. "Termasuk, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari retribusi pelayanan kesehatan mampu memberikan tambahan terhadap PAD Kabupaten Buleleng," pungkasnya. (kar,dha)

Nama Media: **WARTA BALI**

Kategori: **SAUDARA**

Bandara Buleleng Ternyata Kelas LCC



wb/arnyana

Nengah Tamba

DENPASAR - Rencana pembangunan bandara di Bali Utara yang disebut-sebut sebagai bandara internasional, kenyataannya setelah Komisi III DPRD Bali melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan, ternyata hanya akan menjadi bandara low class carrier (LCC).

**BACA: Bandara Buleleng...
di Hal 11**

Sambungan Hal 1

Bahkan, secara tegas Menteri Perhubungan menyebutkan bandara di Buleleng hanya menjadi bandara kelas LCC dan bukan internasional seperti digembar gemborkan Gubernur Bali Wayan Koster. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba di Denpasar, Senin (11/2).

Mendengar apa yang disampaikan Menteri Perhubungan Karya Sumadi, politisi Demokrat asal Jembrana ini sangat menyayangkan. Pasalnya, pesawat yang mendarat nanti adalah kelas pesawat kecil.

Tamba menjelaskan, konsep awal pembangunan bandara baru di Buleleng untuk pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara. Terhadap niat yang baik ini pihaknya sangat mendukung pembangunan bandara di kawasan Bali Utara untuk pemerataan. Hanya saja, pihaknya sangat menyayangkan jika bandara yang

rencananya akan dibangun di Kubutambahan tersebut untuk pesawat-pesawat kecil. "LCC itu pesawat yang murah. Mungkin saja nanti pesawatnya yang baling-baling (perintis) itu. Kalau begitu yang dirancang, untuk apa? Tidak ada gunanya dan itu tidak akan membawa dampak positif terhadap pemerataan pembangunan seperti yang diharapkan," ujarnya.

Saat konsultasi, kata dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Bandara Buleleng kelas LCC. Dengan demikian, bisa jadi ke depan bandara di Buleleng bukan internasional. "Kalau LCC, bandara bukan internasional. Sebab dan rencananya hanya satu runway, bandara biasa saja. Sementara keinginan awal bahwa pembangunan bandara di Bali Utara bisa lebih bagus dari yang ada saat ini di Ngurah Rai Denpasar. Selain pemerataan tujuan lain dibangunnya bandara di Buleleng untuk mengurangi kepadatan di Bandara

Ngurah Rai," paparnya.

Melihat hasil konsultasi Komisi III, Tamba menyarankan kepada pemerintah baik pusat maupun Pemprov Bali supaya memberikan peluang kepada investor lokal untuk membangun bandara. Namun demikian pembebasan lahan harus tuntas karena duitnya sangat besar mencapai Rp3 triliun lebih. "Bali akan dapat duit dari mana?" paparnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada dua investor asal Bali yang siap membangun yakni PT BIBU dan PT Pembari. Kedua investor tersebut menawarkan dua konsep pembangunan yang berbeda. PT BIBU dengan pembangunan di atas laut, sedangkan PT Pembari di atas daratan. "Saya sarankan kepada pak gubernur diujilah kompetensi masing-masing (investor)," sarannya mengaku merasa kasihan dengan kedua investor, terkesan dibuat mengambang padahal mereka juga sudah keluar uang banyak. (arn,tra)

na Media: **WARTA BALI**

Kategori: **KESEHATAN**

Pemkab Buleleng Serukan Gerakan PSN

Hindari Terjangkitnya

Wabah Demam Berdarah Dengue

BULELENG - Musim hujan yang berpotensi menimbulkan terjangkitnya wabah Demam Berdarah Dengue (DPD) mendapat perhatian pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng. Tidak hanya menggerakkan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menghindari terjadinya wabah DBD Pemkab Buleleng juga mengajak dan mengimbau warga masyarakat Buleleng agar melakukan upaya antisipatif.

"Minggu lalu kami sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Dinkes dan jajaran terkait agar mulai menga-

jak masyarakat untuk membersihkan lingkungannya, sehingga dapat terhindar dari DBD," kata Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Senin (11/2) usai rapat konsultasi publik.

Ditegaskan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan gerakan 3M yakni menutup, menguras dan mendaur ulang tempat atau barang yang berpotensi menjadi media tumbuhkembang jentik nyamuk aedes aegypti merupakan upaya efektif mencegah DPD. "Yang paling efektif adalah pemberan-

tas sarang nyamuk (PSN), kepada stakeholder terkait, didesa-desa maupun kelurahan, agar mulai mengajak warga masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungannya," tandas Sutjidra meyakinkan.

Dan bagi warga yang teridentifikasi, terjangkit DBD agar dilakukan penanganan segera, antara lain dengan pemberian cairan dan obat. "Agar tidak berakibat fatal, sesegera mungkin membawa pasien ke RS terdekat untuk mendapatkan perawatan medis," pungkasnya. (kar,dha)



WASPADA DBD: Cegah wabah DBD Wagub Buleleng Nyoman Sutjidra serukan gerakan PSN.

wb/karmay

Nama Media: **WARTA BALI**

Kategori: **RTH**

Disperkimta Buleleng Sikapi Belum Kelarnya RTH-TBK

Putus Kontrak Kerja dan Blacklist Rekanan

BULELENG - Sanksi tegas dikeluarkan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Buleleng terhadap PT. Candra Dwipa selaku rekanan pelaksana pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno (RTH-TBK) Tahap III Tahun 2019. Selain berdasarkan aturan, sanksi pemutusan kontrak kerja dan blacklist terhadap rekanan juga mempertimbangkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Singaraja. "Surat pemutusan kontrak kerja sudah disampaikan kepada rekanan PT. Chandra Dwipa," ungkap Kadis Perkimta Buleleng Nyoman Surattini, dikonfirmasi Senin (11/2) usai mengikuti kegiatan konsultasi publik di Banyualit, Lovina.

Sanksi pemutusan kontrak kerja dan blacklist, kata Surattini,



Nyoman Surattini

ni, dikenakan terhadap rekanan karena hingga batas akhir kesempatan 50 hari kalender atau sampai dengan tanggal 9 Februari untuk menyelesaikan pekerjaan, pembangunan RTH-TBK Tahap III Tahun 2019 tidak selesai. "Sesuai aturan, sanksinya ya pemutusan kontrak kerja dan blacklist," tegasnya.

Selain pemutusan kontrak,

rekanan juga dikenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000/hari x Nilai Kontrak (Rp 5,479 Milyar). "Perhari sekitar Rp 5,479 Juta, dikalikan 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, totalnya Rp 273 Juta lebih. Retensi, jaminan pelaksanaan juga sudah kita mohonkan klaimnya ke Jamkrida, sebesar 5 % dari

nilai kontrak kerja, sekitar Rp. 273,950 Juta," terangnya.

Untuk kelanjutan pekerjaan dan sesuai rekomendasi dari TP4D Kejar Singaraja, Disperkimta melalui PPTK telah melakukan penghitungan progres fisik pekerjaan yang telah dikerjakan hingga tanggal 9 Februari 2019. "Hasil penghitungan, akan kita bahas dalam rapat bersama rekanan dan konsultan, untuk menentukan progres fisik yang diakui dan dapat dibayar kepada rekanan melalui APBD Perubahan Tahun 2019," tandasnya meyakinkan. Ditambahkan, hasil penghitungan progres fisik sampai dengan pemutusan kontrak kerja juga digunakan untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan lebih lanjut. "Siapa yang bisa melanjutkan pekerjaan dan bagaimana prosesnya, masih akan kita konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerin-

tah di Jakarta," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Supardi selaku owner PT. Chandra Dwipa menyatakan pasrah dan tunduk pada sanksi yang akan diterima atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan RTH-TBK Tahap III Tahun 2019 sesuai kontrak kerja No.: 600/2298/RTH/2018, tanggal 24 Agustus 2019 dengan nilai Rp. 5.479 Miliar. "Ya mau bagaimana lagi, namun saya tetap berharap bisa melanjutkan pekerjaan RTH TBK Tahap III ini sampai selesai karena sesuai Perpres rekanan kan masih bisa melanjutkan pekerjaan. Kan sayang, material patung sudah ada dan tinggal dirakit, pekerjaan lagi sedikit, tidak dilanjutkan," ujarnya. Supardi menandakan, akan menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan pekerjaan pada rapat penghitungan progres fisik akhir dengan Disperkimta Buleleng. (kar,ger)